



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diplomasi Kebencanaan Sulawesi Barat: Formulasi Alternatif Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana

Danar Hafidz Adi Wardhana¹, Achmad Fauzi Kusmin²

¹Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Indonesia, danarhafidz.adiwardhana@unsulbar.ac.id

²Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Indonesia, Achmadfauzi.kusmin@unsulbar.ac.id

Corresponding Author: danarhafidz.adiwardhana@unsulbar.ac.id¹

Abstract: *The threat of natural disasters poses a significant challenge to Indonesia. This demands national preparedness to address their devastating impacts. Therefore, this study with the title of “West Sulawesi Disaster Diplomacy: Alternative Policy Formulations in Disaster Preparedness Efforts” aims to identify the root causes of disaster mitigation, particularly in West Sulawesi Province, to enable optimal implementation of Disaster Risk Reduction strategies.*

This study employed William Dunn's public policy analysis method. The researchers conducted Problem Sensing to identify common issues in West Sulawesi, particularly regarding disaster preparedness and mitigation. Next, Problem Searching was conducted to further understand the real situation on the ground. Subsequently, Problem Identification was conducted to identify meta-issues related to disaster issues. After identifying the existing problems, an in-depth analysis was conducted, including gathering evidence demonstrating the urgency of each identified issue and providing recommendations for Policy Alternatives. This study identified various issues related to disaster preparedness and mitigation, including Geographical & Technological, Socio-Cultural, Policy & Political, Legal & Institutional, and Information & Communication. Furthermore, several policy alternatives are offered, including strengthening disaster diplomacy and international cooperation, funding and institutionalization of the "Disaster Resilient Village" program, and strengthening regulations and enforcement of earthquake-resistant building standards.

Keywords: *Public Policy Analysis, Disaster Diplomacy, Disaster Mitigation*

Abstrak: Ancaman bencana alam merupakan tantangan besar bagi Indonesia. Hal ini menuntut kesiapan nasional untuk menghadapi dampak destruktifnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah pada mitigasi bencana, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga bisa mengimplementasikan strategi Pengurangan Risiko Bencana yang optimal.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan publik milik William Dunn, di mana peneliti melakukan *Problem Sensing* untuk menemukan masalah umum yang ada di Sulawesi Barat, khususnya mengenai kesiapan dan mitigasi bencana. Selanjutnya dilakukan *Problem Searching* untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi riil di lapangan. Setelah itu, dilakukan *Problem Identification* untuk mengetahui mendasar meta masalah yang berkaitan dengan isu kebencanaan. Setelah menemukan masalah yang ada, kemudian dilakukan analisis

mendalam terhadap masalah-masalah yang ada, seperti menambahkan bukti-bukti yang menunjukkan urgensi setiap masalah yang ditemukan, lalu memberikan rekomendasi *Policy Alternatives*.

Penelitian ini menemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, diantaranya adalah masalah Geografis & Teknologis, Sosial-Budaya, Kebijakan & Politik, Hukum & Kelembagaan serta Informasi & Komunikasi. Selanjutnya terdapat beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan, diantaranya adalah Memperkuat Diplomasi Kebencanaan dan Kerja Sama Internasional, Pendanaan dan Institusionalisasi Program "Desa Tangguh Bencana" serta Penguatan Regulasi dan Penegakan Standar Bangunan Tahan Gempa.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Publik, Diplomasi Kebencanaan, Mitigasi Bencana

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik, sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Negara ini telah mengalami banyak bencana dahsyat sepanjang sejarahnya, termasuk tsunami Aceh tahun 2004 yang dahsyat, yang merenggut lebih dari 275.000 jiwa dan menyebabkan jutaan orang mengungsi (Sari, 2023). Demikian pula, letusan Gunung Merapi tahun 2010 mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan kerusakan yang meluas di Jawa Tengah. Selain itu, gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi pada tahun 2018 yang menyebabkan bencana susulan likuifaksi juga menunjukkan urgensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketahanan bencana di Indonesia (Abdullah, 2021). Dampak yang ditimbulkan oleh bencana-bencana tersebut sangat destruktif, sehingga menimbulkan pertanyaan lain mengenai kesiapan ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi bencana besar lainnya di masa depan. Karena bukan tidak mungkin Indonesia dilanda oleh bencana yang lebih besar, terlebih dengan adanya potensi gempa megathrust.

Mengingat tantangan ini, memastikan ketahanan pangan selama dan setelah bencana tersebut telah menjadi perhatian penting bagi Indonesia. Bencana alam sering kali mengganggu rantai pasokan pangan karena infrastruktur yang rusak dan kendala logistik. Gangguan ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan pangan pokok yang parah, memperburuk kerentanan di antara populasi yang terdampak yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, mengembangkan sistem pangan tangguh yang mampu menahan guncangan dari bencana di masa mendatang sangat penting bagi stabilitas nasional.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kekhawatiran mengenai potensi gempa bumi megathrust di sepanjang zona subduksi Indonesia. Aktivitas tektonik ini menimbulkan risiko yang signifikan tidak hanya karena daya rusaknya yang langsung, tetapi juga karena dapat memicu bencana sekunder seperti tsunami atau tanah longsor yang dapat menghancurkan area pertanian yang penting untuk produksi pangan. Ancaman yang ditimbulkan oleh fenomena geologi ini memerlukan tindakan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan strategi kesiapsiagaan bencana sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Diplomasi memainkan peran penting dalam manajemen bencana dengan memfasilitasi kerja sama internasional dan mobilisasi sumber daya selama krisis. Ini melibatkan negosiasi perjanjian bantuan dengan negara atau organisasi lain sambil berbagi praktik terbaik terkait strategi tanggap bencana secara global. Diplomasi yang efektif dapat meningkatkan kapasitas Indonesia untuk merespons dengan cepat ketika menghadapi keadaan darurat yang disebabkan oleh fenomena alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana inisiatif diplomatik terkait manajemen bencana dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi yang dirancang untuk memperkuat ketahanan Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja alternatif kebijakan yang bisa digunakan secara efektif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mitigasi bencana?

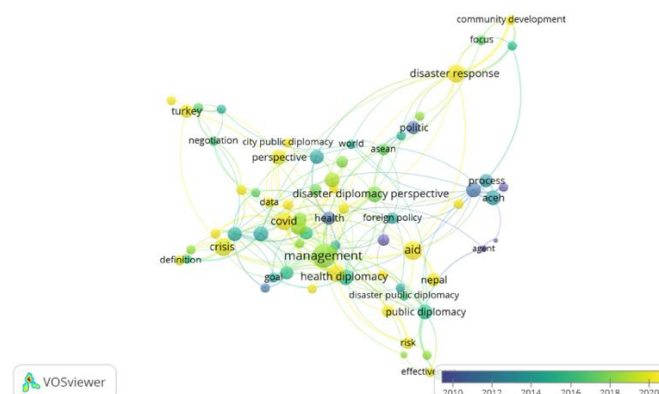
METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan publik milik William Dunn, dimana peneliti melakukan *Problem Sensing* untuk menemukan masalah umum yang ada di Sulawesi Barat, khususnya mengenai kesiapan dan mitigasi bencana. Selanjutnya dilakukan *Problem Searching* untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi riil di lapangan. Setelah itu, dilakukan *Problem Identification* untuk mengetahui mendasar masalah yang berkaitan dengan isu kebencanaan. Setelah menemukan masalah yang ada, kemudian dilakukan analisis mendalam terhadap masalah-masalah yang ada, seperti menambahkan bukti-bukti yang menunjukkan urgensi setiap masalah yang ditemukan, lalu memberikan rekomendasi *Policy Alternatives* (Dunn, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman bencana alam menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia. Kesiapan ketahanan pangan nasional menjadi krusial dalam menghadapi potensi dampak destruktif dari bencana tersebut. Beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan yang tidak lama ini adalah gempa yang disertai dengan likuifaksi di Palu pada tahun 2018. Berdasarkan pengalaman masa lampau, maka Indonesia perlu berbenah untuk meningkatkan kesiapan nasional dalam menghadapi bencana alam di masa depan, terlebih dengan adanya potensi gempa megathrust yang diprediksi akan terjadi di Indonesia. Disamping kesiapan ketahanan pangan pada masa bencana, Indonesia juga perlu untuk memerhatikan hubungan dengan negara lain, dalam hal ini adalah melakukan diplomasi kebencanaan. Diplomasi kebencanaan ini berpeluang besar untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana, sekaligus membangun ketahanan pangannya.

Hingga saat ini, diplomasi kebencanaan masih belum menjadi topik utama baik di kalangan akademisi maupun pengambil kebijakan, hal ini dapat terlihat dari minimnya kajian-kajian tentang diplomasi kebencanaan. Berdasarkan pada data yang ditarik menggunakan aplikasi VosViewer, penelitian mengenai diplomasi kebencanaan atau *disaster diplomacy* masih sangat minim, khususnya sejak tahun 2020 tidak terdapat penelitian yang terkait dengan diplomasi kebencanaan.



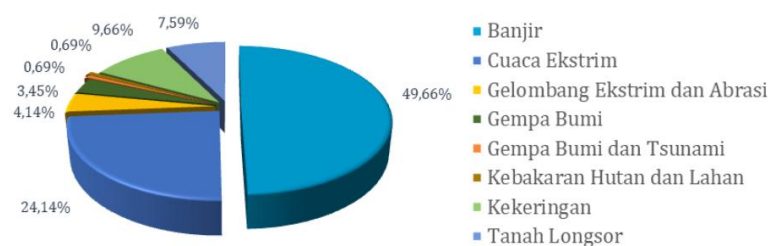
Sumber: Hasil Riset
Gambar 1. Visualisasi VosViewer

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena jika berkaca dari pengalaman menghadapi bencana-bencana besar di masa lampau, Indonesia masih belum bisa mengambil tindakan preventif yang optimal. Kerja sama di bidang kebencanaan dengan negara-negara tetangga dan sekutu masih sangat asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

strategi ketahanan pangan Indonesia dan kaitannya dengan diplomasi kebencanaan, serta mengidentifikasi potensi kerja sama luar negeri Indonesia, khususnya pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam bidang kebencanaan, sehingga Indonesia mampu mengimplementasikan kebijakan *Disaster Risk Reduction dengan optimal*.

Problem Searching

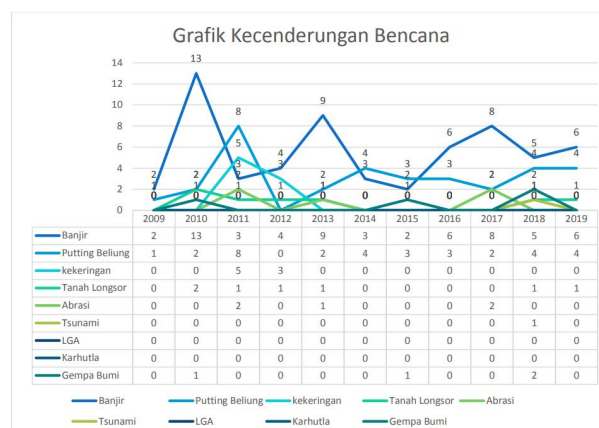
Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang rentan terdampak oleh bencana, khususnya bencana alam. Hal ini perlu menjadi perhatian baik, dari pemerintah daerah, pusat maupun masyarakat secara umum, khususnya yang bermukim di Sulawesi Barat. Dari segi kerentanan, terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi melanda Sulawesi Barat, seperti banjir, gempa bumi dan gelombang ekstrem.



Sumber: BPBD Sulawesi Barat

Gambar 2. Kerentanan Bencana Sulawesi Barat

Berdasarkan data profil kerentanan bencana di Sulawesi Barat, dapat diidentifikasi bahwa ancaman bencana di wilayah tersebut didominasi secara signifikan oleh bahaya hidrometeorologi. Analisis ini mengungkapkan bahwa banjir memiliki persentase kerentanan tertinggi, yaitu 49,66%, menjadikannya sebagai bencana paling krusial. Hal ini juga berkaitan erat dengan cuaca ekstrem yang menempati posisi kedua dengan presentase kerentanan 24,14%. Selain itu, fenomena gelombang ekstrem dan abrasi tercatat memiliki presentase kerentanan sebesar 4,14%, yang merefleksikan kerawanan kawasan pesisir provinsi tersebut terhadap dinamika laut, termasuk potensi impacts akibat kenaikan muka air laut dan cuaca buruk di laut. Selain itu, bahaya geologis murni seperti gempa bumi menunjukkan tingkat kerentanan sebesar 0,69%. Secara keseluruhan, profil ini menyoroti perlunya strategi mitigasi dan adaptasi yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, penguatan sistem peringatan dini untuk cuaca dan gelombang, serta kebijakan pencegahan kebakaran yang komprehensif (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025).



Sumber: BPBD Sulawesi Barat

Gambar 3. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat 2009-2019

Masalah utama adalah tingginya tingkat kerentanan bencana di Sulawesi Barat yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan upaya mitigasi yang memadai. Sulbar merupakan daerah yang memiliki multi-bencana (multi-hazard), dengan ancaman utama antara lain: **Bencana Geologis**: Wilayah Sulbar dilintasi oleh Sesar Makassar dan Sesar Palu-Koro,

membuatnya sangat rawan terhadap gempa bumi. Gempa berkekuatan M 6,2 yang mengguncang Mamuju pada 15 Januari 2021 adalah bukti nyata, yang menewaskan lebih dari 100 orang dan menyebabkan kerusakan masif. **Bencana Hidrometeorologis**: Sebagai daerah kepulauan dengan topografi berbukit, Sulbar juga rentan terhadap banjir bandang, tanah longsor, dan puting beliung, terutama pada musim penghujan. **Tsunami**: Beberapa wilayah pesisirnya, seperti Mamuju dan Majene, juga berpotensi terdampak tsunami akibat aktivitas seismik di laut (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025).

No.	JENIS BAHAYA	BAHAYA LUAS BAHAYA (Ha)				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	BANJIR	5.637	99.492	91.941	197.070	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	18.851	20.640	43.495	82.986	TINGGI
3	COVID-19	1.566.879	9.177	0	1.576.056	RENDAH
4	CUACA EKSTREM	250.005	127.848	68.519	446.372	TINGGI
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	877.312	0	0	877.312	RENDAH
6	GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	7.196	933	1.239	9.368	TINGGI
7	GEMPABUMI	1.418.534	132.686	24.836	1.576.056	TINGGI
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	619.392	459.579	11.617	1.090.588	SEDANG
9	KEGAGALAN TEKNOLOGI	24	0	0	24	RENDAH
10	KEKERINGAN	86.671	1.488.793	592	1.576.056	TINGGI
11	LIKUEFAKSI	6.531	210.134	6.319	222.984	SEDANG
12	TANAH LONGSOR	20.916	435.615	803.404	1.259.935	TINGGI
13	TSUNAMI	8.024	9.616	4.256	21.896	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Sumber: BPBD Sulawesi Barat

Gambar 4. Rekapitulasi Bahaya di Prov. Sulawesi Barat

Kerentanan ini diperparah oleh faktor populasi, seperti pemukiman yang padat dan tidak terencana, infrastruktur yang belum memenuhi standar tahan gempa, serta kesadaran masyarakat akan evakuasi mandiri yang masih rendah. Kurangnya mitigasi terlihat dari minimnya infrastruktur peringatan dini (seperti sirine tsunami), lemahnya sosialisasi peta evakuasi, dan belum optimalnya pelatihan kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat masyarakat. Penjelasan diatas merupakan pendefinisian masalah (problem search) menurut Dunn dalam tahapan formulasi kebijakan, Pendefinisian masalah kebijakan berisi tentang situasi masalah yang terjadi dilapangan (Dunn, 1995).

Policy Identification

Untuk mengidentifikasi masalah kebijakan, menurut Dunn tahapan ini dilakukan dengan memetakan masalah agar lebih tertata dan mudah didefinisikan sebab terjadinya. Adapun meta masalah dari akar atau penyebab mendasar dari kurangnya mitigasi bencana tersebut.

1. Kompleksitas dan Multi-Bencana: Sulbar tidak hanya menghadapi satu jenis bencana, tetapi multi-bencana (gempa, tsunami, likuifaksi, banjir bandang, longsor). Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan mitigasi yang terintegrasi dan canggih, yang seringkali sulit diimplementasikan (Hartono et al., 2021).
2. Keterpencilan dan Aksesibilitas: Sebagian wilayah rawan bencana di Sulbar terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini menyulitkan pendistribusian bantuan logistik mitigasi, pemasangan alat early warning system, dan evakuasi jika bencana terjadi.
3. Keterbatasan Data dan Teknologi: Data seismik dan peta risiko mikro yang detail dan terupdate seringkali tidak tersedia. Teknologi yang ada mungkin sudah ketinggalan zaman atau tidak terpelihara dengan baik.
4. Fatalisme dan Persepsi Religius yang Keliru: Sebagian masyarakat memandang bencana semata-mata sebagai takdir atau ujian dari Tuhan tanpa diimbangi dengan pemahaman untuk melakukan ikhtiar (usaha) menyelamatkan diri melalui mitigasi. Ini mengurangi motivasi untuk terlibat dalam program kesiapsiagaan.
5. Pudarnya Kearifan Lokal: Pengetahuan lokal tentang membaca tanda-tanda alam (seperti perilaku hewan atau perubahan cuaca) yang dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini non-formal mulai hilang akibat modernisasi dan tidak diteruskan ke generasi muda.

6. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas: Pengalaman masa lalu dimana bantuan atau informasi dari pemerintah tidak tepat sasaran atau lambat dapat menimbulkan sikap apatis dan tidak percaya terhadap program mitigasi yang diusung pemerintah.
7. Kemiskinan dan Kerentanan Sosial-Ekonomi: Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki pilihan terbatas. Mereka cenderung tinggal di lahan-lahan berisiko tinggi (lereng curam, bantaran sungai, dekat patahan) karena harganya lebih murah, dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun rumah tahan gempa.
8. Trade-Off Kebijakan Fiskal: Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit antara mengalokasikan dana untuk program yang langsung terlihat hasilnya (seperti membangun jalan atau memberikan bantuan sosial) versus program mitigasi yang hasilnya tidak kasat mata (mencegah sesuatu yang mungkin terjadi).
9. Ketergantungan pada Sektor Rentan: Perekonomian daerah mungkin sangat bergantung pada sektor-sektor yang rentan terhadap bencana (seperti pertanian dan perikanan), sehingga ketika bencana terjadi, pemulihan ekonominya berlangsung sangat lambat dan memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
10. Kebijakan yang Reaktif, bukan Proaktif: Siklus kebijakan penanggulangan bencana lebih banyak didorong oleh alarmism pascabencana. Begitu kejadian bencana mereda dari pemberitaan, perhatian dan anggaran untuk mitigasi pun mengering.
11. Lemahnya Koordinasi dan Silosasi Birokrasi: BPBD sebagai leading sector seringkali tidak memiliki otoritas yang kuat untuk memaksa dinas lain (seperti PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan) untuk mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana (PRB) dalam program mereka. Masing-masing dinas bekerja dengan target dan anggarannya sendiri-sendiri.
12. Masa Jabatan Politik yang Pendek: Visi kepala daerah yang hanya 5 tahun cenderung berorientasi pada proyek-proyek jangka pendek yang membuahkan hasil politik dalam waktu singkat. Investasi mitigasi bencana adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya mungkin baru dirasakan oleh kepala daerah berikutnya.
13. Penegakan Hukum yang Lemah: Meskipun secara hukum telah ada mandat untuk membangun bangunan tahan gempa (melalui SNI), penegakan dan pengawasannya di lapangan sangat lemah. Kolusi dengan developer atau ketidaktahuan kontraktor lokal menyebabkan aturan ini sering diabaikan.
14. Kapasitas Kelembagaan BPBD yang Terbatas: BPBD daerah seringkali menjadi "tempat penampungan" untuk penempatan pejabat yang tidak memiliki latar belakang teknis kebencanaan. Alhasil, kapasitas teknis untuk merancang program mitigasi yang efektif sangat rendah.
15. Kerangka Regulasi yang Kompleks dan Tumpang Tindih: Terkadang terdapat ketidakharmonisan antara Perda satu dengan lainnya, atau antara Perda dengan regulasi pusat, yang menyulitkan implementasi di lapangan (Triutomo, 2021).
16. Disinformasi dan Misinformasi: Pesan-pesan mitigasi yang disampaikan oleh pemerintah seringkali tidak sampai dengan baik kepada masyarakat atau disalahtafsirkan. Di saat kritis, misinformasi tentang gempa susulan atau tsunami dapat menyebar cepat melalui media sosial dan menimbulkan kepanikan.
17. Sistem Komunikasi yang Rentan: Infrastruktur komunikasi (seperti BTS) seringkali menjadi korban pertama saat bencana gempa besar, memutus akses informasi yang sangat dibutuhkan untuk koordinasi tanggap darurat dan penyebaran peringatan.

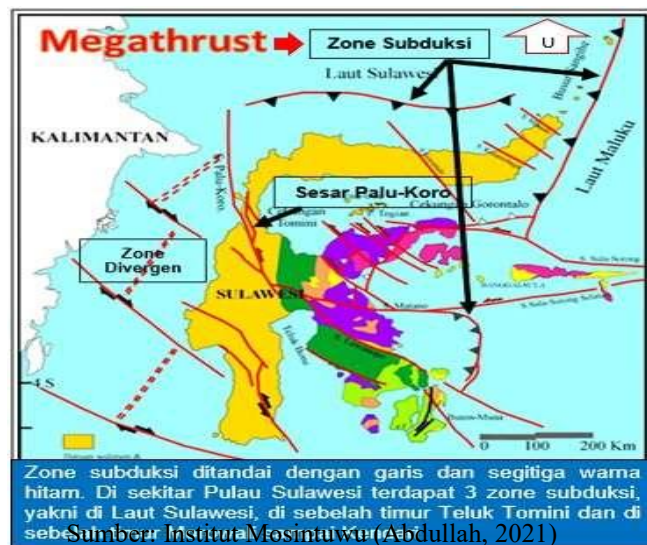
Problem Specifications

Setelah mengidentifikasi masalah tahapan selanjutnya adalah memperjelas spesifikasi masalah yaitu memperkuat meta masalah dengan bukti empiris.

1. Masalah Geografis & Teknologis:

Pasca gempa Mamuju 2021, para peneliti menyoroti lokasi dan kondisi geografis Sulawesi Barat yang rentan terhadap bencana gempa. “Hasil analisis tim peneliti menunjukkan bahwa guncangan utama gempa pada 2021 telah memecahkan sebagian segmen Makassar Strait Thrust dan mengaktifkan struktur sesar sekunder. Sesar sekunder ini kemungkinan membawa bagian updip (batuan atas) yang tidak pecah ke dalam kondisi mendekati runtuh sehingga berpotensi menjadi sumber gempa di masa depan”(Arif, 2023).

Hingga saat ini, Sulawesi Barat belum memiliki peta mikrozonasi bencana. Sejak tahun 2018, Kepala BNPB Sutopo Purwo Nugroho telah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk membuat peta mikrozonasi untuk mengetahui daerah rawan gempa dan likuifaksi gempa bumi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. (Briantika, 2018).



Gambar 5. Peta Geotektonik Sulawesi

2. Masalah Sosial-Budaya:

Pada saat kegiatan Dzikir dan Istighozah satu tahun bencana gempa Sulawesi Barat di Masjid Babul Jannah, para pemuka agama menyampaikan bahwa bencana merupakan salah satu rencana dari Yang Maha Kuasa dan sekaligus cara untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada-Nya. Selain itu, musibah juga dampak dari perbuatan dosa dari manusia (Harmany, 2022).

Survey Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan DPMD dan dinas ketahanan pangan Majene, setiap desa memiliki interpretasi masing-masing dalam penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana, sehingga banyak program yang tidak maksimal dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mitigasi bencana di desa. Banyak desa di Kabupaten Majene yang belum mengimplementasikan Desa Tagana, meskipun sudah menjadi anjuran dari BNPB.



Sumber: Kompas.com

Gambar 5. Masyarakat mendekati reruntuhan bangunan pasca gempa di Mamuju (Irfan Kamil, 2021)

3. Masalah Ekonomi:

Data BPS menunjukkan bahwa indeks gini ratio atau persentase penduduk miskin di kabupaten rawan bencana seperti Mamuju dan Majene tergolong tinggi. Selain itu, pengeluaran makan per kapita di Sulawesi Barat rata-rata 530.100 rupiah (BPS, 2023), sedangkan Sulawesi Selatan tercatat mencapai angka 1 juta rupiah, dan kota Makassar tercatat mencapai angka Rp 1.803.710 (BPS Sulawesi Barat, 2024). Data ini secara langsung menghubungkan kemiskinan dengan kerentanan. Kemiskinan di Sulawesi Barat tercatat meningkat drastis, pada tahun 2025 terdapat sekitar 10.000 jiwa yang berada pada tingkat kemiskinan ekstrim. (Suandi, 2025).

4. Masalah Kebijakan & Politik:

Pemberitaan tentang RAPBD Sulbar tahun 2022-2023 menunjukkan alokasi untuk BPBD tidak mengalami kenaikan signifikan pascabencana besar, bahkan cenderung dialihkan untuk program lain. Ini membuktikan sifat kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan. Notulensi rapat koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dapat menunjukkan perselisihan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas audit ketahanan gempa bangunan sekolah. Ini adalah bukti substantif dari silosasi birokrasi. Proyek pembangunan rumah susun tahan gempa untuk pengungsi mengalami keterlambatan pembangunan yang sangat lama, hingga melebihi masa jabatan kepala daerah yang menginisiasinya. Ini membuktikan dampak dari masa jabatan politik yang pendek.

5. Masalah Hukum & Kelembagaan:

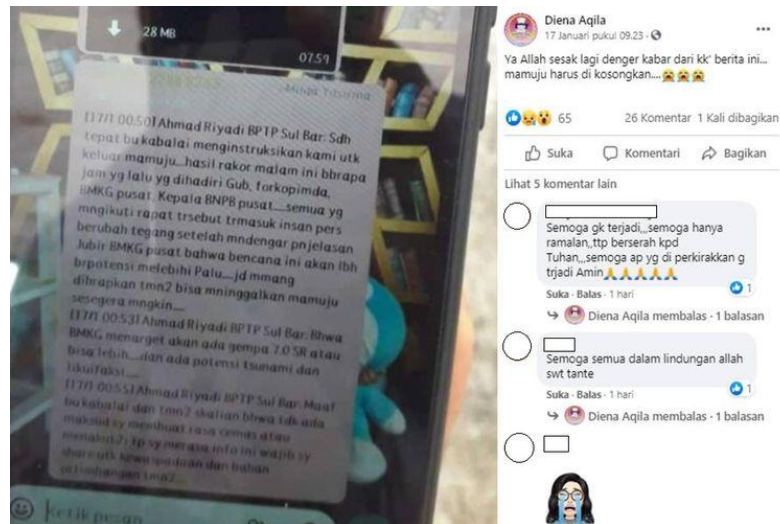


Sumber: Enews Indonesia

Gambar 7. Rumah Makan Titalayo tidak memiliki IMB dan Reklamasi

Terdapat berbagai bangunan yang tidak memiliki IMB di Majene, selain itu beberapa bangunan dianggap menyalahi aturan dan berpotensi memiliki dampak buruk bagi lingkungan, seperti yang terjadi pada RM Titalayo. Setelah beberapa tahun berjalan, RM Titalayo ternyata tidak memiliki IMB dan izin Reklamasi (Ardi, 2025).

6. Substantif dari Meta Masalah Informasi & Komunikasi:



Sumber: Kompas.com

Gambar 8. Berita hoax gempa Mamuju

Pascagempa, beredar hoaks melalui WhatsApp dan Facebook mengenai akan adanya gempa berkekuatan lebih besar, menyebabkan kepanikan massal dan warga mengungsi untuk kedua kalinya. Ini adalah bukti nyata disinformasi (Kompas.com, 2021). Menurut wawancara yang dilakukan dengan dinas BPBD Majene, pernah dilakukan pemasangan rambu-rambu dan arah evakuasi namun, hal tersebut sudah lama dan saat ini banyak rambu-rambu yang rusak dan tidak lagi berfungsi sebagai penunjuk arah evakuasi. Selain itu tidak pernah diadakan kajian mendalam untuk menggunakan kearifan lokal sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggap bencana masyarakat.

Policy Alternatives

Alternatif Kebijakan 1: Penguatan Regulasi dan Penegakan Standar Bangunan Tahan Gempa. Kebijakan ini berfokus pada aspek *structural mitigation* dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan dan mengawasi penerapan standar bangunan tahan gempa untuk semua konstruksi baru, terutama bangunan publik (sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintah) dan pemukiman di zona rawan.

a. Kriteria Teknis:

- **Efektivitas:** Sangat efektif karena langsung menangani akar masalah utama tingginya korban jiwa akibat runtuhnya bangunan. Tujuan mengurangi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dapat tercapai.
- **Kecukupan:** Kebijakan ini cukup memadai untuk memecahkan masalah kerentanan fisik infrastruktur, meskipun harus dilengkapi dengan kebijakan non-struktural (seperti pelatihan) untuk *coverage* yang lebih menyeluruh.

b. Kriteria Ekonomi:

- **Efisiensi Biaya (*Cost Effectiveness*):** Dalam jangka panjang, kebijakan ini SANGAT efisien. Biaya penambahan untuk membangun tahan gempa hanya 3-5% lebih mahal, tetapi dapat menghemat triliunan rupiah untuk biaya rekonstruksi pascabencana dan yang terpenting, menyelamatkan nyawa.
- **Keuntungan (*Profitability*):** Keuntungannya bersifat sosial dan finansial jangka panjang: terciptanya lingkungan yang lebih aman, penghematan anggaran daerah untuk rehabilitasi, dan peningkatan *confidence investor*.

c. Kelayakan Politik:

- **Penerimaan (*Acceptability*):** Mungkin menghadapi tantangan dari developer dan kontraktor yang mengeluhkan biaya tambahan, serta masyarakat yang kurang paham. Namun, kebijakan ini akan sangat diterima oleh para ahli, lembaga sipil, dan korban selamat bencana. Membutuhkan *political will* yang kuat dari kepala daerah.
- **Kepantasan (*Appropriateness*):** Sangat pantas dan selaras dengan nilai masyarakat untuk melindungi keselamatan warganya. Juga sejalan dengan nilai religius bahwa menyelamatkan nyawa adalah bagian dari ibadah.

d. Kriteria Administrasi:

- **Otoritas (*Authority*):** Dinas PUPR dan BPBD memiliki otoritas untuk menyusun standar teknis dan melakukan pengawasan.
- **Komitmen Institusi (*Institutional Commitment*):** Membutuhkan komitmen tinggi dan koordinasi yang kuat antara Dinas PUPR, BPBD, dan pemerintah daerah untuk pengawasan dan penegakan hukum.
- **Kapabilitas (*Capability*):** Kemungkinan besar membutuhkan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengawas di lapangan untuk memastikan standar diterapkan. Pelatihan teknis sangat diperlukan.

Alternatif Kebijakan 2: Pendanaan dan Institusionalisasi Program "Desa/Kelurahan Tangguh Bencana" (Destana) yang Berkelanjutan, Kebijakan ini mengalokasikan dana APBD khusus yang terstruktur dan berkelanjutan untuk program Destana, bukan sekadar program seremonial. Dana digunakan untuk pelatihan rutin, pembuatan peta evakuasi, pemasangan rambu, pembentukan tim siaga, dan simulasi berkala di setiap desa/kelurahan rawan bencana (Humaeroh, 2025).

a. Kriteria Teknis:

- **Efektivitas:** Sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*community-based disaster risk management*), yang merupakan ujung tombak kesiapsiagaan. Langsung menyasar akar masalah sosial budaya.
- **Kecukupan:** Cukup memadai untuk membangun ketahanan dari tingkat terbawah. Merupakan fondasi utama dari sistem mitigasi yang komprehensif.

b. Kriteria Ekonomi:

- **Efisiensi Biaya (*Cost Effectiveness*):** Biaya pelatihan dan simulasi relatif murah dibandingkan dengan manfaatnya yang besar, yaitu masyarakat yang mampu menyelamatkan diri sendiri tanpa menunggu bantuan pusat.
- **Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency*):** Input (dana pelatihan) vs Output (masyarakat yang siap siaga) memiliki nilai rasio yang sangat tinggi. Sumber daya manusia yang terlatih adalah aset yang paling berharga.

c. Kelayakan Politik:

- **Penerimaan (*Acceptability*):** Sangat tinggi dan mudah diterima oleh semua pihak, baik masyarakat, legislatif, maupun eksekutif, karena bersifat membangun dan memberdayakan.
- **Daya Tanggap (*Responsiveness*):** Kebijakan ini sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput untuk merasa aman dan berdaya.

- o **Keadilan (*Equity*):** Dana dapat dialokasikan secara adil ke semua desa yang masuk dalam kategori rawan bencana.

d. Kriteria Administrasi:

- o **Otoritas (*Authority*):** BPBD memiliki otoritas sebagai leading sector, berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
- o **Komitmen Institusi (*Institutional Commitment*):** Membutuhkan komitmen berkelanjutan dari kepala daerah untuk menganggarkan program ini setiap tahun, bukan hanya saat ada musibah.
- o **Dukungan Organisasi (*Organizational Support*):** Memerlukan dukungan dari fasilitator (LSM, relawan, TNI/Polri) untuk membantu pelaksanaan pelatihan.

Alternatif Kebijakan 3: Memperkuat Diplomasi Kebencanaan dan Kerja Sama Internasional, Kebijakan ini berfokus pada upaya pro-aktif Pemerintah Daerah Sulbar, didukung oleh Pemerintah Pusat (melalui BNPB, Kemlu, Kemendagri), untuk menjalin kemitraan teknis dan finansial dengan negara sahabat, lembaga donor internasional, dan NGO global untuk mendukung program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (Herningtyas & Surwandono, 2014). Bentuknya bisa berupa bantuan teknis, hibah (grant), pinjaman lunak, pelatihan, dan alih teknologi.

a. Kriteria Teknis:

- o **Efektivitas:** Sangat efektif untuk mengatasi masalah keterbatasan pendanaan dan teknologi. Alternatif ini dapat menyediakan sumber daya yang tidak dimiliki APBD, seperti sistem peringatan dini (early warning system) canggih, pelatihan ahli geologi dan seismolog, serta teknologi pemetaan risiko resolusi tinggi. Tujuan mendapatkan sumber daya tambahan untuk mitigasi dapat tercapai.
- o **Kecukupan:** Kebijakan ini sangat memadai sebagai pelengkap (complementary) bagi ketiga alternatif sebelumnya. Dana hibah luar negeri dapat membiayai pembelian alat early warning system (mendukung Kebijakan 3), pelatihan tim Destana (mendukung Kebijakan 2), atau ahli untuk menyusun standar bangunan tahan gempa (mendukung Kebijakan 1).

b. Kriteria Ekonomi:

- o **Efisiensi Biaya (*Cost Effectiveness*):** Sangat efisien dari perspektif daerah karena banyak program yang berbentuk hibah (grant), yang berarti Sulbar mendapatkan manfaat besar (teknologi, pelatihan, infrastruktur) dengan biaya yang minimal atau bahkan nol dari APBD. Daerah hanya perlu menyediakan counterpart fund atau komitmen operasional dan pemeliharaan.
- o **Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency*):** Input (tenaga dan waktu untuk negosiasi) vs Output (dana dan teknologi senilai miliaran rupiah) memiliki rasio yang sangat menguntungkan.
- o **Keuntungan (*Profitability*):** Keuntungannya adalah percepatan pembangunan kapasitas mitigasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan.

c. Kelayakan Politik:

- o **Penerimaan (*Acceptability*):**
 - **Pemerintah Pusat:** Sangat diterima, karena sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam kerja sama kemanusiaan dan kebencanaan. BNPB sering menjadi focal point kerja semacam ini.
 - **Pemerintah Daerah:** Akan sangat diterima karena menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah.
 - **Masyarakat:** Umumnya diterima selama proyek tersebut transparan dan benar-benar bermanfaat untuk keselamatan mereka.

- **Kepantasan (*Appropriateness*):** Sangat pantas dan sesuai dengan nilai gotong royong dan kerja sama kemanusiaan yang diakui secara global. Indonesia sendiri sering menjadi penerima bantuan dan donor, sehingga ini adalah praktik yang normal dalam hubungan internasional.
- **Keadilan (*Equity*):** Membantu menjembatani kesenjangan kapasitas antara daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas tetapi memiliki risiko bencana tinggi dengan standar keselamatan yang diperlukan.

d. Kriteria Administrasi:

- **Otoritas (*Authority*):** Pemerintah Daerah (melalui Gubernur dan BPBD) memiliki otoritas untuk menjalin kerja sama sister province atau kerja sama teknis, tetapi **harus berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat** (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) sesuai peraturan perundang-undangan. Ini adalah tantangan administrasi terbesar.
- **Komitmen Institusi (*Institutional Commitment*):** Membutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah untuk memprioritaskan ini dan membentuk tim kecil yang fokus menjalin hubungan dan menyusun proposal proyek yang bankable dan menarik bagi donor.
- **Kapabilitas (*Capability*):** Memerlukan kapabilitas khusus di tubuh pemerintah daerah, seperti:
 - Kemampuan berbahasa Inggris.
 - Kemampuan menyusun proposal proyek sesuai standar internasional.
 - Kemampuan negosiasi.
 - Kemampuan mengelola proyek internasional (pelaporan keuangan dan teknis yang akuntabel).
- **Dukungan Organisasi (*Organizational Support*):** BPBD akan menjadi leading sector, tetapi harus didukung penuh oleh Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Policy Recommendation

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah diukur menggunakan kriteria alternatif kebijakan Diplomasi Kebencanaan merupakan alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, mempunyai kelayakan politik yang paling baik, dan mendapat dukungan organisasi pemerintah terkait. Diplomasi kebencanaan bukanlah pengganti, melainkan *penguat* dan *pemercepat* dari tiga alternatif kebijakan domestik sebelumnya. Kerja sama internasional adalah *enabler* (pemungkin). Sebagai usulan kebijakan, bentuk kebijakan diplomasi kebencanaan dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Untuk mendukung Kebijakan 1 (Standar Bangunan): Dapat mengajukan kerja sama teknis dengan JICA (Jepang) untuk mendatangkan ahli gempa guna mereview dan menyusun pedoman teknis bangunan tahan gempa yang sesuai konteks Sulbar (Husain, 2022).
2. Untuk mendukung Kebijakan 2 (Destana): Dapat mengajukan hibah dari USAID atau UNDP untuk program pelatihan masif dan pembentukan komunitas siaga bencana di seluruh desa rawan (Kamaruzzaman et al., 2016).
3. Untuk mendukung Kebijakan 3 (Dana Abadi): Dapat mengajukan pinjaman lunak (*soft loan*) dari World Bank atau ADB untuk membiayai pembangunan infrastruktur mitigasi skala besar, seperti sistem peringatan dini terintegrasi (McDonald & Wilcox, 2020).

KESIMPULAN

Alternatif Diplomasi Kebencanaan ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Kriteria terlemahnya ada pada aspek Administrasi, khususnya kapabilitas SDM dan kompleksitas birokrasi untuk berkoordinasi dengan pusat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus diambil adalah membangun kapasitas internal BPBD dan Pemerintah Daerah dalam merancang dan mengelola kerja sama internasional, serta menjalin komunikasi intensif dengan BNPB yang telah memiliki pengalaman dan jaringan luas dalam kerja sama ini. Dengan demikian, Sulawesi Barat dapat memanfaatkan peluang diplomasi kebencanaan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memperkuat ketahanannya terhadap bencana. Diplomasi kebencanaan ini dapat dilakukan melalui pengajuan kerja sama dengan berbagai negara maupun organisasi internasional seperti, JICA, USAID, UNDP serta World Bank. Berbagai organisasi internasional tersebut bisa memberikan dukungan kepada Indonesia, baik dalam hal mitigasi bencana maupun pasca bencana.

REFERENSI

- Abdullah, D. (2021). *Gempa Megathrust dan Tsunami Besar, Intai Pulau Sulawesi*. Gempa Megathrust dan Tsunami Besar, Intai Pulau Sulawesi
- Ardi. (2025). *PUPR Majene: Bangunan Rumah Makan Tipalayo Tak Kantongi IMB dan Reklamasi Tanpa Izin*. <https://kilassulbar.id/pupr-majene-bangunan-rumah-makan-tipalayo-tak-kantongi-imb-dan-reklamasi-tanpa-izin/>
- Arif, A. (2023). *Gempa M 6,2 Mamuju 2021 Aktifkan Sesar Sekunder, Bisa Jadi Sumber Bahaya ke Depan*. <https://www.kompas.id/artikel/gempa-m-62-mamuju-pada-2021-mengaktifkan-sesar-sekunder-bisa-jadi-sumber-bahaya-ke-depan>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2025). *RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT*.
- BPS Sulawesi Barat. (2024). *Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan (Rupiah), 2023*. <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTI0IzI=/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-makanan.html>
- Briantika, A. (2018). *BNPB Minta Pemda untuk Susun Peta Mikrozonasi Daerah Rawan Gempa*. <https://tirto.id/bnpb-minta-pemda-untuk-susun-peta-mikrozonasi-daerah-rawan-gempa-c5mS>
- Dunn, W. N. (1995). *Analisa Kebijakan Publik: kerangka analisa dan prosedur perumusan masalah*. PT. Hanindita Graha Widya.
- Fauzi, K. A., & Saputra, A. N. (2024). *Formulasi Kebijakan Publik* (Andriyanto (ed.)). Penerbit Lakeisha.
- Harmany, M. (2022). *Setahun Gempa Bumi, Ini Kata NU dan Muhammadiyah*. <https://wacana.info/berita/6037/play/200/wacana--membangun-generasi-literasi.html>
- Hartono, D., Khoirudin Apriyadi, R., Winugroho, T., Aprilyanto, A., Hadi Sumantri, S., Wilopo, W., & Surya Islami, H. (2021). Analisis Sejarah, Dampak, Dan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Sulawesi Barat. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 218–224. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.218-224>
- Herningtyas, R., & Surwandono, S. (2014). Diplomasi Bencana Alam sebagai Saran Meningkatkan Kerjasama Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2), 181–188. <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0060.181-188>
- Humaeroh, S. (2025). *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana : Studi Program “ Desa Tanguh Bencana ” di Desa Panimbangjaya , Kabupaten Pandeglang*. 4(1), 34–43.
- Husain, S. (2022). PERAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) PASCA BENCANA ALAM 2018 DI SULAWESI TENGAH. *Spektrum*, 19(2). <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/SPEKTRUM/article/view/6660/4079>
- Irfan Kamil, N. S. (2021). *Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa*

- Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/16/06531401/update-hingga-sabtu-dini-hari-189-orang-dirawat-akibat-gempa-mamuju-637?page=all>
- Kamaruzzaman, Tresna, I., Agustina, I., Ramadhanjaya, R., Arifin, & Haerrohman. (2016). Modul Pelatihan Fasilitator. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24. https://bpbd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Modul-Pelatihan-Fasdestana-BNPB-Edisi-VII-2018-rev2_lowres.pdf
- Kompas.com. (2021). *[HOAKS] Mamuju Harus Dikosongkan karena Akan Ada Gempa Lebih Besar dan Tsunam*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/19/094600665/-hoaks-mamuju-harus-dikosongkan-karena-akan-ada-gempa-lebih-besar-dan?page=all>
- Mcdonald, A., & Wilcox, T. (2020). *Disaster Risk Reduction in Indonesia Disaster Risk Reduction Status Report 2020*.
- Sari, H. (2023). *BPBA: Tsunami Peningat Pentingnya Mitigasi Bencana*. <https://drive.google.com/drive/folders/12hLWjgOSKXHvXXpsx0PoXB4ak7wjKntK>
- Suandi. (2025). *Kemiskinan Ekstrem Sulbar Meningkat 2 Kali Lipat Kini Tembus 21 Ribu Jiwa, Tertinggi Mamuju*. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/05/20/kemiskinan-ekstrem-sulbar-meningkat-2-kali-lipat-kini-tembus-21-ribu-jiwa-tertinggi-mamuju>
- Triutomo, S. (2021). Ketahanan Bencana : Refleksi atas Kompleksitas Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Siap Siaga*, 4, 1–3.